

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

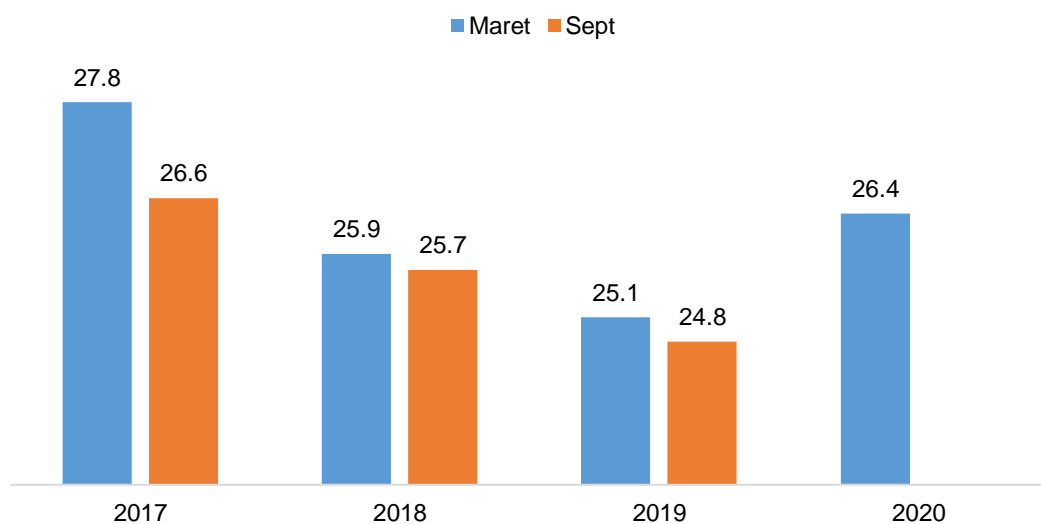
Pengembangan sektor pertanian sampai saat ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Selain sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan petani, sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan nasional. Namun, saat ini yang terjadi adalah munculnya masalah-masalah pertanian seperti yang tercantum dalam konsep Pembangunan Nasional (Hidayatullah, 2018).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki. Dalam hubungan ini, Suharto menetapkan 5 (lima) program strategi pemberdayaan, yaitu memberikan motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, mobilitas sumberdaya, pembangunan dan pengembangan jejaring. Pemberdayaan (empowerment) petani akan berdampak luas terhadap pembangunan nasional, karena lebih dari 60% penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian menurut Iskandar hampir 80% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Dengan demikian pemberdayaan petani sangat penting untuk dilakukan karena menyentuh mayoritas penduduk Indonesia. Dan secara tidak langsung hal ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya petani (Sukino, 2013).

Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang memiliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya). Melihat dari beberapa pengertian yang ada mengenai

pemberdayaan sebagian besar membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan berusaha untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka.

Pengelolaan potensi sumber daya alam di pedesaan belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumberdaya untuk mendorong potensi yang tersedia. Dengan kegiatan pemberdayaan pelaku ekonomi melalui kelompok usaha dapat membantu dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memperbaiki perekonomian dengan mandiri. Kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi yang terbagi menjadi dua bagian yaitu kemiskinan yang terjadi pada masyarakat perkotaan dan kemiskinan pada masyarakat pedesaan. Penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia di dominasi oleh masyarakat yang hidup di pedesaan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2012-2020, sebagai berikut:



Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017 – 2020  
Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi daripada di perkotaan. Karena sebagian besar penduduk pedesaan bermata pencaharian di sektor pertanian, maka dapat dimaknai bahwa tingkat kemiskinan sektor pertanian kondisinya lebih banyak dibanding sektor lainnya. Permasalahan pada pertanian sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, dimana rata-rata dari petani di Indonesia terhambat dalam aspek permodalan karena sulitnya mendapatkan bantuan modal. Dengan adanya kemiskinan yang dialami oleh masyarakat petani maka akan berdampak pada produktivitas pertanian.

Penyebab ketidakberdayaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian maka Pemerintah berupaya untuk menanganinya melalui berbagai program- program pembangunan yang berbasis pemberdayaan pedesaan. Salah satu program dalam pembangunan pedesaan ialah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/ Permentan /OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program ini merupakan program dari Kementerian Pertanian yang dilaksanakan dibawah Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang berada dalam kelompok program pemberdayaan. Sebagai program pemberdayaan, PUAP diawali dengan proses peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana kegiatan PUAP di lapangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2015 telah menetapkan tujuan dibentuknya program PUAP yang merupakan salah satu program penting yang memberikan fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Dana PUAP yang lebih dikenal dengan istilah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) disalurkan melalui

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. Bantuan dana tersebut digunakan dan dimanfaatkan dengan format simpan pinjam bergulir untuk membiayai kegiatan produktif budidaya (*on-farm*) dan kegiatan non budidaya (*off-farm*), dimana hal tersebut berkaitan dengan pertanian (Departemen Pertanian, 2011).

Tingginya potensi sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto sangat mendukung untuk pengembangan sektor agribisnis. Pemerintah Kabupaten Mojokerto memilih Kecamatan Mojoanyar yaitu Gapoktan Rukun Makmur sebagai salah satu penerima BLM PUAP guna mengembangkan sektor agribisnis yang menjadi potensi di wilayah tersebut. Gapoktan Rukun Makmur masih aktif dalam melaksanakan program PUAP, meskipun pengelolaan program PUAP ada yang berlanjut dan ada yang tidak berlanjut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kementerian Pertanian menggulirkan program PUAP mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh PMT (Penyelia Mitra Petani) kepada Gapoktan penerima dana PUAP tetap harus dilaksanakan dengan pembebanan biaya dari Pemerintah Daerah. Namun demikian tidak semua daerah siap mengambil alih tanggungjawab tersebut. Padahal salah satu keberhasilan program PUAP adalah intensitas pengawasan dan pembinaan yang intensif oleh Pendamping baik itu PMT dan Penyuluh Pertanian. Oleh sebab itu perlu adanya terobosan kebijakan dari Pemerintah Daerah terkait pengambilan tanggungjawab program PUAP dalam Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Kabupaten Mojokerto mulai tahun 2008 s/d tahun 2016 telah mendapatkan alokasi BLM-PUAP sebanyak 228 Gapoktan dari 298 Desa yang tersebar di 18 Kecamatan. Salah satunya Gapoktan di Kabupaten Mojokerto

yang masih aktif dalam melaksanakan Program PUAP adalah Gapoktan Rukun Makmur Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar. Gapoktan Rukun Makmur merupakan salah satu gapoktan yang mampu mengembangkan dana PUAP dimana pada tahun awal pelaksanaan program selalu melaksanakan laporan pertanggung jawaban (LPJ) di SHU cukup tinggi, namun dengan berjalannya waktu SHU menurun karena kesadaran masyarakat yang mulai menurun/rendah sehingga banyak peminjam yang mulai mengalami menunggak pembayaran ataupun membuat laporan pertanggung jawaban. Dengan demikian ada yang melanjutkan dan ada yg tidak melanjutkan (macet). Sebaran gapoktan penerima BLM PUAP Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Sebaran Alokasi Penerima BLM PUAP di Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 – 2016

No	Kecamatan	Jumlah Gapoktan Penerima PUAP
1	Jatirejo	14
2	Gondang	14
3	Pacet	19
4	Trawas	11
5	Ngoro	6
6	Pungging	10
7	Kutorejo	13
8	Mojosari	9
9	Bangsalsari	13
10	Mojoanyar	7
11	Dlanggu	13
12	Puri	15
13	Trowulan	13
14	Sooko	15
15	Gedeg	11
16	Kemlagi	14
	<b>Jumlah Total</b>	<b>228</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mojokerto, 2020

Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana PUAP kepada Gapoktan sebesar Rp100.000.000 sebagai modal unit usaha mikro (simpan pinjam) gapoktan yang digunakan untuk permodalan usaha anggota gapoktan, akan tetapi bantuan dana PUAP yang diberikan Pemerintah tersebut mengalami hambatan / kendala dalam pelaksanaannya, yaitu masih rendahnya kesadaran

masyarakat petani (anggota Gapoktan) untuk membayar tanggungannya. Mereka sering telat (mangkir) dalam membayarnya, pengurus juga sungkan jika terlalu memaksa kepada petani anggota untuk segera membayar pinjamannya. Petani menganggap dana tersebut merupakan dana hibah dari Pemerintah yang tidak perlu dikembalikan pinjamannya. Sebagian petani memanfaatkan dana PUAP sebagai cadangan usaha lain di luar pertanian untuk konsumsi non pangan rumah tangga, sehingga pelaksanaan program PUAP dimasing-masing kelompok petani ada yang berlanjut dan ada yang tidak berlanjut. Lemahnya Sumber Daya Manusia Kelembagaan petani (Gapoktan, Poktan) juga mempengaruhi pengelolaan pelaksanaan pengembangan program PUAP. Lemahnya pengawasan oleh tim pendamping dalam pelaksanaan program PUAP.

Sumber Daya Manusia ini tidak bisa berdiri sendiri namun perlu di arahkan melalui pelatihan dan alih teknologi. Semakin efektifnya suatu Gapoktan dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang dimilikinya maka tujuan pembentukan kelompok tersebut akan semakin tajam. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas Organisasi kelembagaan gapoktan tersebut. Keorganisasian yang dapat dikatakan mandiri dan mapan dapat dilihat dari kelengkapan unsur organisasi tersebut. Kemandirian dapat dilihat melalui ada tidaknya struktur organisasi, berjalan tidaknya kesisteman dalam stuktur tersebut, hubungan internal dalam organisasi, dan pendanaan yang diperoleh oleh organisasi. Sedangkan kemampuan terkait dengan bagaimana organisasi dapat survive dalam menjalankan roda organisasinya dan jika dalam kajian ini adalah gapoktan maka bagaimana gapoktan ini mampu mengembangkan usahatani dalam kelompoknya.

Berdasarkan uraian diatas Strategi pengelolaan dan pelaksanaan berpengaruh terhadap keberlanjutan jalannya program PUAP, sehingga dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Program PUAP di Kabupaten Mojokerto?
2. Apa saja faktor - faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman serta peluang bagi keberlanjutan program PUAP di Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana Strategi yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui Keberlanjutan Program PUAP di Kabupaten Mojokerto?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka secara umum penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mendiskripsikan program PUAP di Kabupaten Mojokerto
2. Menganalisis faktor - faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman serta peluang bagi keberlanjutan program PUAP di Kabupaten Mojokerto.
3. Merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat melalui implementasi keberlanjutan program PUAP di Kabupaten Mojokerto.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain

1. Manfaat teoritis  
Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan
2. Manfaat praktis
  - 1) Bagi masyarakat, dalam hal ini Gabungan Kelompok tani  
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya kelompok tani mengenai program pemberdayaan melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

- 2) Bagi pihak pelaksana kebijakan, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dan instansi yang terlibat.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis dalam memberikan masukan tentang perbaikan strategi bagi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang terlibat dalam melaksanakan Pemberdayaan dalam keberlanjutan program PUAP

- 3) Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu tambahan berupa pemahaman, pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang bagaimana kondisi nyata dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam keberlanjutan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Keberlanjutan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (Puap) dari yang diketahui oleh peneliti, ada beberapa yang telah melakukan penelitian seperti yang tersebut di atas. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berbeda dari lokasi dan alat analisis yang digunakan.